

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdaulat dikenal oleh seluruh dunia dianugerahi sumber kekayaan alam yang melimpah. Pulau Jawa adalah pulau penghasil beras terbesar di Indonesia yang dimana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan juga memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian sangatlah penting dan strategis hal ini dikarenakan, sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja dan juga menghasilkan komoditas bahan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia, dan juga menghasilkan bahan mentah bagi industri-industri besar serta menghasilkan devisa bagi negara.

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor ini adalah melalui penyediaan pupuk subsidi bagi petani. Namun, dalam pelaksanaannya, distribusi pupuk subsidi seringkali mengalami berbagai permasalahan, seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, keterlambatan distribusi, hingga praktik penyelewengan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah meluncurkan kebijakan Kartu Tani sebagai instrumen digital yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pendistribusian pupuk subsidi.

Kartu Tani merupakan alat yang mengintegrasikan data petani ke dalam sistem elektronik, sehingga distribusi pupuk dapat dilakukan berdasarkan data riil kebutuhan petani yang telah terverifikasi. Dengan Kartu Tani, petani hanya dapat membeli pupuk subsidi sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dalam sistem. Meski memiliki potensi sebagai solusi digital yang efisien, implementasi kebijakan ini di berbagai daerah masih menghadapi tantangan yang kompleks.

Tabel 1.1 Data Golongan Kelompok Tani Kecamatan Tambun Utara

Data Golongan Kelompok Tani Kecamatan Tambun Utara		
Desa	Kelompok Tani	Jumlah
Satria Jaya	Mekar Jaya 2	4 Kelompok Tani
	Mekar Jaya 3	3 Kelompok Tani
Srimahi	Bungur 1	3 Kelompok Tani
	Lengkong 1	7 Kelompok Tani
	Kalen kendal 1	4 Kelompok Tani
	Alas Malang I	3 Kelompok Tani
	Serut I	1 Kelompok Tani
Satria Mekar	Tambun Kelapa II	3 Kelompok Tani
	Tambun Kelapa I	5 Kelompok Tani
	Pisangan Jaya	2 Kelompok Tani
	Ketos I	1 Kelompok Tani
Jejalen Jaya	Harapan Jaya II	1 Kelompok Tani
Srijaya	Cempaka I	1 Kelompok Tani
	Kobak Luing	3 Kelompok Tani
	Gabus Singkil II	1 Kelompok Tani
	Tani Serut	2 Kelompok Tani
	Cempaka II	1 Kelompok Tani
	Gabus Singkil I	1 Kelompok Tani
Sriamur	Kedondong I	1 Kelompok Tani
	Sumur Batu II	2 Kelompok Tani
	Turi Jaya	1 Kelompok Tani
	Kendodong II	1 Kelompok Tani
Srimukti	Gabus Ujung	1 Kelompok Tani
	Bangkit Tambun Tua	1 Kelompok Tani
Total Keseluruhan :		48 Kelompok Tani

Sumber : Data Injeksi Kecamatan Tambun Utara

Berdasarkan pada tabel 1.1 Data Golongan Kelompok Tani Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tersebut setiap Desa terdapat Golongan Kelompok Tani. Secara keseluruhan Kelompok Tani memiliki jumlah total 48 Kelompok Tani dari 6 Desa di Kecamatan Tambun Utara.

Di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota yang masih memiliki lahan pertanian produktif, kebijakan

Kartu Tani mulai diimplementasikan untuk mendukung distribusi pupuk subsidi. Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan literasi digital petani, masalah teknis dalam penggunaan mesin EDC, serta ketidaksesuaian data petani dengan sistem yang ada. Hal ini memunculkan pertanyaan sejauh mana kebijakan Kartu Tani dapat diimplementasikan secara efektif di wilayah tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian menimbang bahwa Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Petani yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan atau disebut dengan nama lain yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pengesahan oleh kepala dinas atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi pertanian di kabupaten/kota. Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disesuaikan pada tahun berjalan.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris: crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak (raising), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan (Purba, et al., 2020, hal. 1)

Usaha tani (farming) adalah bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Petani adalah sebutan bagi

mereka yang menyelenggarakan usaha tani, sebagai contoh "petani tembakau" atau "petani ikan". Pelaku budidaya hewan ternak (livestock) secara khusus disebut sebagai peternak. Menurut Soetriono dan Suwandari (2017) Ilmu pertanian (agricultural science) ialah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola tanaman, ternak, ikan dan lingkungannya agar memberikan hasil yang semaksimal mungkin. (Ilmu Petani Berdasi, 2017).

Di Indonesia subsidi di sektor pertanian menjadi komponen kebijakan distributif pemerintah dalam membangun sektor pertanian. Implementasi kebijakan subsidi diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas produksi petani serta merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya membangun swasembada pangan Indonesia. Jika dilihat secara sejarah Implentasi kebijakan subsidi hadir disetiap periode pemerintahan. Di masa orde baru, selain untuk menambah kapasitas produksi serta memodernisasikan sektor pertanian sebagai pilihan strategis di masa itu. Pada saat ini subsidi yang diberikan ruang lingkupnya lebih meluas. Di era reformasi saat ini sunsi subsidi diberikan tidak hanya diberikan pada sarana dan prasarana produksi di sektor pertanian namun di alokasikan atas bunga usaha kredit program dan premi asuransi usaha tanam padi.

Namun pada realitas yang terjadi yang dialami para petani adalah kelangkaan pupuk dan harga yang naik. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pertanian Telah mengeluarkan Kebijakan Kartu Tani. Dalam implemntasinya pemenuhan atas sisi ketepatan menjadi masalah yang relatif kompleks. Dalam penebusan pupuk bersubsidi kelompok tani dan petani kerap berpedoman pada usulan kebutuhan pupuk yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Hal ini memunculkan permasalahan turunan, misalkan persespsi kelangkaan pupuk, mengingat alokasi Hal ini potensial memunculkan permasalahan turunan, misal persepsi kelangkaan, mengingat alokasi riil pupuk bersubsidi kerap dibawah usulan yang diajukan kelompok tani/petani. Tantangan lain yang menjadi penambah urgensi yakni belum optimal pengawasan atas implementasi program-program subsidi. Monitoring dan evaluasi atas berjalannya program subsidi belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini setidaknya dapat diikuti dalam pengawasan

terhadap penyaluran pupuk bersubsidi belum optimal. Kartu Tani merupakan strategi pembangunan pertanian yang visioner dan integratif. Yang didalamnya berkaitan dengan kejelasan tata ruang nasional, infrastruktur, pola pengusahaan pertanian, kelembagaan pertanian, riset dan teknologi tepat guna, supply chain management, aspek keuangan, monitoring neraca produksi dan stok nasional, serta bagian dari industri berbasis pertanian.

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani sesuai dengan program Pemerintah di sektor pertanian. Pasal 15 dari peraturan ini mengatur penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan regulasi perdagangan yang menetapkan distribusi pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dengan menggunakan kartu tani. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 adalah salah satu langkah Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan dan harga yang terjangkau untuk pupuk subsidi, serta memaksimalkan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani. Pemerintah mengakui bahwa keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan memerlukan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi, produktivitas, dan kinerja sektor pertanian melalui berbagai langkah yang diambil (Kompas.com, 2022).

Jenis-jenis pupuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah meliputi Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk Organik. Distribusi pupuk ini mencakup seluruh wilayah di Provinsi Aceh, dengan prinsip 6T, yaitu pemberian tepat jenis, jumlah, harga, waktu, dan mutu pupuk. Saat ini, pengecer yang ditunjuk atau diangkat oleh distributor di tiap Kecamatan atau Desa menjadi elemen krusial dalam kesuksesan distribusi pupuk subsidi, memastikan pupuk sampai ke tangan petani yang berhak menerimanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yakni melalui RDKK (BPK RI, 2020).

Kebijakan subsidi pupuk di mana telah dilaksanakan oleh pemerintah kemudian disempurnakan dengan menetapkan program kartu tani, program ini dilaksanakan karena sering muncul permasalahan dalam pendistribusian subsidi

pupuk oleh pemerintah kepada petani. Program ini diselenggarakan untuk menyempurnakan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi untuk dapat menjamin adanya sifat transparan serta akuntabilitas pada pemberian bantuan pupuk bersubsidi untuk para petani. Dasar hukum ditetapkan program kartu tani yaitu, Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2017 dan Permendagri No. 15/MDag/Per/4/2013 mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem kartu tani, mengetahui persepsi masyarakat terhadap prosedur kartu tani serta mengetahui salah satu fungsi kartu tani yaitu dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Kartu tani juga berfungsi untuk melakukan transaksi pada umumnya seperti ATM. Kartu tani juga adalah sarana layanan perbankan yang berfungsi dan terintegrasi sebagai melakukan , transaksi, pinjaman, simpanan sekaligus kartu subsidi secara otomatis sehingga akan mengurangi alokasi pupuk bersubsidi dan saldo rekening tabungan yang dimiliki oleh petani (Basuki, 2019).

Adapun sistem pendataan yang disediakan oleh pemerintahan yaitu Sistem Elektronik Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). e-RDKK adalah sistem pendataan yang di bertujuan untuk mendata kebutuhan kelompok tani agar anggota kelompok tani yang membutuhkan tempat sasaran. Namun Temuan oleh Ombudsman hampir diseluruh wilayah Indonesia Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan Maladministrasi dalam pendataan Petani pada Sistem e-Rdkk. Hal ini disebabkan karena Kementerian Pertanian tidak mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh pertanian karena data e-RDKK tidak valid. Institusi yang menjadi kunci validnya data terletak pada Dinas pertanian. Selain itu dalam pencairan kebijakan dalam segi dan prasarana pun tidak cermat melalui Direktru Jendral sarana dan prasarana dalam mengalokasikan penembusan pupuk bersubdi secara serentak di seluruh Indonesia (DISTANKAN, 2020).

Di regional kota maupun kabupaten Dinas pertanian selaku aktor dalam pembinaan tugas penyuluha pertanian tidak mampu mengoptimalkan jumlah penyuluh yang tersedia di wilayah kerjanya. Seperti halnya Fenomena yang terjadi

Di Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 Kecamatan hanya segelintir Balai Penyuluhan Yang aktif dan tanggap menerima aspirasi dari para petani dan Balai Penyuluhan pertanian tidak aktif sebagaimana fungsi dan tugasnya. Akibat dari itu Para petani tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait kartu tani untuk subsidi pupuk.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam menyediakan barang dan jasa dalam mengalokasi pupuk bersubsidi. Yang dimana berdasarkan petunjuk penyuluhan dan pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2018 yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian Republik Indonesia tahun 2017 pupuk bersubsidi adalah dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian. Berdasarkan Jenis Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 terdapat lima jenis pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk masyarakat yaitu urea, sp 36, za, npk, dan organik (KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA, 2022)

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Pasal 5 berbunyi:

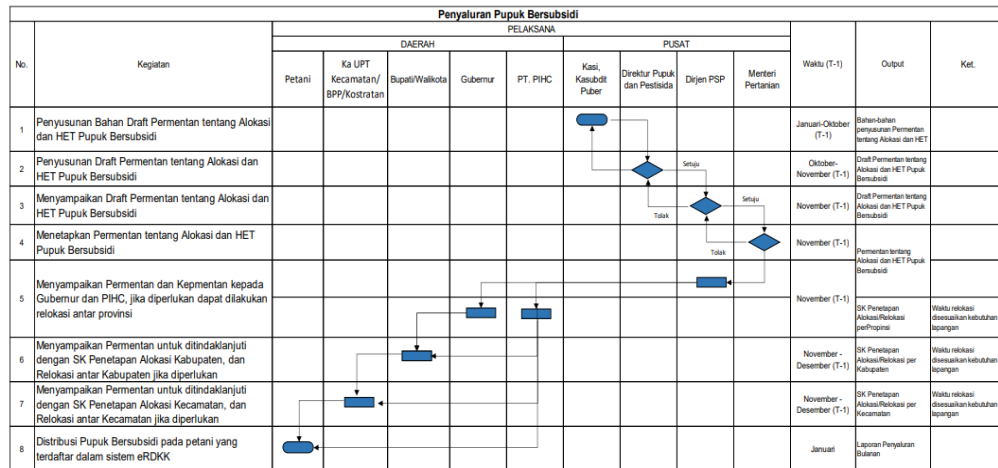
- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun e-RDKK sebagai berikut:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam; dan/atau
 - b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada Penambahan Luas Area Tanam Baru (PATB) .

Berdasarkan Peraturan diatas pada praktek lapangannya Implemetasi jumlah pupuk yang distribusikan tidak sesuai pada jumlah kuota petani yang berada di daerah-daerah Pendistribusian Pupuk subsidi ini. Program Subsidi pupuk

ini sudah berjalan sejak tahun 2016. Dengan menggunakan Kartu itu untuk menebus pupuk dengan harga yang murah melalui mesin atm sebagai alat transaksinya. Di setiap provinsi memiliki Bank mintranya tersendiri. Misalkan di Jawa Barat menggunakan Bank Mandiri di Banten menggunakan Bank Tabungan Negara (BTN). Jawa Tengah menggunakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 2020).

Para petani di seluruh Indonesia sudah terbiasa menggunakan pupuk produksi pabrik dengan harga yang murah namun setiap tahun harga pupuk semakin meningkat. Para petani merasa kelimpungan apabila tiba-tiba harga pupuk dua kali lipat. Pemerintah terus berupaya dalam penyempurnaan implementasi penggunaan Kartu Tani ini. Lewat Kartu Tani, pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, perencanaan penyebaran Kartu Tani ke seluruh Indonesia akan dilakukan bertahap. Namun pada realita Kartu Tani agak tersendat. Karena banyak petani belum punya kartu tani, secara teknis kementerian pertanian mengeluarkan surat yang dimana pupuk subsidi diberlakukan bagi para petani yang memegang kartu tani, sedangkan untuk yang belum punya, akan dilakukan secara manual.

Berdasarkan data dari Kementrian Pertanian jumlah petani berdasarkan eRDKK ada 13,9 juta orang. Sedangkan Kartu Tani yang telah dicetak 9,3 juta kartu, dan Kartu Tani yang terdistribusi sekitar 6,2 juta kartu. Dari jumlah itu, Kartu Tani yang digunakan baru 1,2 juta yang telah disalurkan. Namun Banyak dari non-petani terdaftar pada sistem e-RDKK. banyak data pentani yang ganda, data e-RDKK tidak muktahir, banyak petani kecil belum terdaftar Pada e-RDKK, banyak Nik tidak sesuai dengan Disdukcapil. Data lahan yang seragam. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah penyuluh pertanian dalam melakukan penyuluhan pertanian serta rendahnya kompetensi penyuluh pertanian dan kecilnya alokasi anggaran penyuluhan pertanian. Menilik dalam hal ini komprensi yang terjadi Di Kabupaten Bekasi khususnya kecamatan Tambun Utara banyak petani kecil tidak terdaftar dalam e-RDKK. Banyak yang tidak berstatus petani namun mendapatkan kartu tani (BARITO POST.co.id, 2020).

Tabel 1.2 Alur Penyaluran Pupuk Bersubsidi

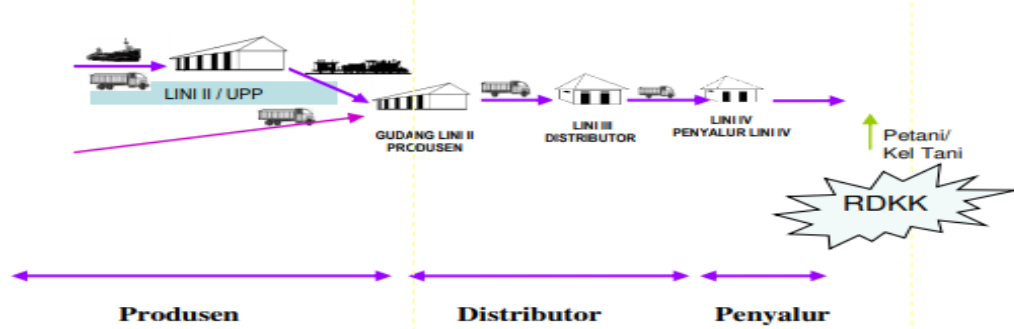
Sumber : Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA 2023

Di tingkat produsen, pada saat ini Indonesia memiliki 5 perusahaan BUMN yang memproduksi pupuk bersubsidi untuk kebutuhan nasional, yakni PT. Pupuk Sriwijaya (Pustri), PT Pupuk Kaltim (PKT), dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT Petro Kimia Gresik (PKG), dan PT Pupuk Kujang (PK). Sistem rayonisasi yang selama ini diterapkan pada penyaluran pupuk bersubsidi adalah suatu sistem distribusi terbuka. Dalam sistem distribusi terbuka, alur distribusi pupuk dibagi dalam dua alur distribusi. Pertama, yaitu alur distribusi ke daerah biasa atau daerah yang dapat dengan mudah dijangkau sarana transportasi, dimana dilakukan pendistribusian melalui saluran distribusi yang telah ditetapkan. Kedua, alur distribusi ke daerah yang sulit dijangkau dimana pendistribusian dilakukan secara langsung oleh produsen dengan sistem operasi pasar (Sudjono, 2011).

Pada jalur distribusi biasa, tiga pabrik yaitu Pusri, PKT dan PIM masingmasing menyalurkan pupuk urea bersubsidi ke gudang lini II (tingkat provinsi) atau gudang unit pengantongan pupuk (UPP) di pelabuhan. Dari UPP, pupuk kemudian didistribusikan lagi ke gudang lini III atau disebut gudang produsen, yang berada di tingkat kabupaten. Dua produsen pupuk lainnya, yakni PKG dan PK, tidak mendistribusikan melalui lini II/UPP, melainkan langsung ke gudang produsen di lini III. Melalui gudang lini III inilah, pupuk didistribusi ke gudang distributor di tingkat kecamatan (lini IV). Pengangkutan dari gudang lini III

ke gudang lini IV distributor umumnya menggunakan transportasi darat (Sudjono, 2011). Secara sederhana mata rantai distribusi dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.

Gambar 1.1 Mata Rantai Distribusi Pupuk Bersubsidi Saat Ini di Indonesia



Sumber : Jurnal Sistem Distribusi Berbasis Relationship: Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petani

Akibatnya harga eceran pupuk subsidi menjadi objektifitas oleh kios-kios swasta dan pemilik modal sehingga ketersediaan barang menjadi langka dan tinggi harganya. Di Kabupaten Bekasi tidak ada kios-kios yang langsung dari pemerintah. Banyak kios pengecer melakukan mekanismenya secara sepihak. Kemudian dinas pertanian mengatur mekanisme penebusan secara sepihak dan terdapat penyimpangan penebusan di kelompok tani (bekasikab.go.id, 2022).

Kabupaten bekasi terkenal sebagai lumbung padi nasional pada era keemasannya dulu. Sebuah kabupaten yang berada di daerah Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 1.484,25 Km² yang terbagi atas 23 Kecamatan. Dengan jumlah penduduk 2.830.401 Juta Jiwa. Kabupaten bekasi di bagi menjadi 4 wilayah pengembangan (WP) yang dimana setiap zonasi memiliki Fungsi dan kegunaanya masing-masing. Menurut catatan Dinas pertanian pada 2018 jumlah kelompok Tani di Kabupaten Bekasi terdapat 1700 Kelompok ditengah himpitan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman sebanyak 1.100 lahan pertanian menyusut setiap tahunnya khususnya di wilayah utara Kabupaten Bekasi, hal itu disebabkan adanya defrontasi lahan pertanian menjadi lahan peindustrian dan perumahan yang terus menjamur (bekasikab.go.id, 2024).

Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi memastikan para petani sudah dapat menebus pupuk subsidi hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk. Perubahan regulasi pennebusan pupuk subsidi dari menggunakan Kartu Tani menjadi KTP ini tertuang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 1 tahun 2024. Di mana para petani dapat mengambil dua jenis **pupuk subsidi** itu pada kios-kios yang telah ditentukan. Saat ini, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi tengah melakukan perapihan data kepada kelompok tani untuk masuk ke dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) di tahun 2025.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam proses implementasi kebijakan Kartu Tani dalam distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas layanan subsidi pertanian di tingkat lokal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan kajian tentang Efektivitas Implentasi Tani Dalam Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tambun Utara, sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Kartu Tani dalam distribusi pupuk di Kecamatan Tambun Utara?
2. Hambatan apa yang terjadi dalam implementasi kebijakan Kartu Tani dalam pendistribusian pupuk subsidi?
3. Upaya untuk mengatasi hasil dari implementasi kebijakan Kartu Tani dalam mendistribusikan Pupuk Subsidi?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai melalui penelitian tersebut. Dengan tujuan tersebut, penulis melaksanakan penelitian yang ingin dicapai. Tujuan pada penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan Kartu Tani dalam distribusi pupuk di Kecamatan Tambun Utara
2. Untuk mengidentifikasi hambatan apa yang terjadi dalam implementasi kebijakan Kartu Tani dalam pendistribusian pupuk subsidi
3. Untuk mendeskripsikan upaya mengatasi hasil dari implementasi kebijakan Kartu Tani dalam mendistribusikan Pupuk Subsidi

1.4 Signifikan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikan Akademik

Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan selama observasi dan sejumlah data-data yang dikumpulkan, Dan diharapkan dengan hasil penelitian ini, bagi peneliti dapat menjadi sarana dalam menambah pengetahuan, wawasan dan latihan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah serta mengaplikasikannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan bisa menjadi acuan bagi mahasiswa, kampus, dan atau juga menjadi bahan referensi penelitian berikutnya. Supaya nantinya bisa juga dapat membedakan teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Penelitian terdahulu merupakan bahan untuk penelitian selanjutnya dimana penelitian-penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan hasil penelitian lainnya. Adapun beberapa dari penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini antara lain :

Penelitian pertama, dengan judul “Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara” mendeskripsikan pembangunan pertanian diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi modern yang efektif dan berkelanjutan. Realita yang sering dihadapi petani adalah kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk mengakibatkan petani kesulitan dalam meningkatkan produktivitas lahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil

penelitian efektivitas program menggunakan empat indikator yaitu keberhasilan sasaran, pencapaian tujuan secara keseluruhan, ketersediaan sarana dan prasarana kerja, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif. Dalam efektivitas program kartu tani di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas program yaitu teknologi, peraturan daerah, sumber daya manusia, dan belum adanya anggaran khusus untuk kartu tani. Saran yang diberikan antara lain sosialisasi secara berkala, regenerasi terkait sumber daya manusia lansia, pengadaan anggaran untuk program kartu tani, dan peningkatan koordinasi antara kios pengecer lengkap, petani, dan Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Banjarnegara (Ashari & Hariani, 2019).

Penelitian kedua, dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap penggunaan Kartu Tani di Kabuapten Pati" mendeskripsikan terkait kartu tani yang merupakan program baru untuk pembelian pupuk bersubsidi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penggunaan kartu tani dipengaruhi oleh sistem subsidi, sistem distribusi, sistem informasi manajemen pertanian . Persepsi penggunaan kartu tani menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi di daerah dataran dan perbukitan. Pemanfaatan kartu tani rata-rata hanya digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Kendala penggunaan kartu tani adalah kurangnya sosialisasi sedangkan harapannya adalah ingin lebih dipermudah baik sistem maupun teknis pembelian (Kurniawati & Kurniawan)

Penelitian ketiga, dengan judul "Dampak Kartu Tani terhadap produksi dan efisiensi usaha tani di Kabupaten Jember" mendeskripsikan Kebijakan Kartu Tani ditujukan guna mendukung pembangunan pertanian, khususnya peningkatan produktivitas tanaman padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kartu tani terhadap produksi dan efisiensi usahatani padi di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan variabel luas lahan, jumlah benih, jumlah pupuk urea, jumlah pupuk ZA, jumlah tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi padi. Hasil lainnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan

produktivitas petani penerima dan non penerima kartu tani yaitu 53,80 kuintal/ha dan 53,07 kuintal/ha. Usahatani padi penerima kartu tani dan bukan penerima kartu tani dapat dikatakan efisien secara teknis karena berada di atas nilai 0,70 (Zainuddin & Wibowo, 2021).

Penelitian ke empat, yang berjudul "Problematika Impelementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak" mendeskripsikan bahwa penelitian ini dilaksanakan pada Januari-Maret 2020 dengan menggunakan jenis eksplanatori dan merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus. Lokasi ditentukan dengan purposive sampling. Penentuan informan menggunakan metode snowball sampling sehingga didapatkan 21 informan. Pengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, catatan lapang dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1). Pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sudah sesuai dengan SOP kartu tani yang dibuat oleh pembuat kebijakan, walaupun demikian permasalahan teknis dan non teknis terdapat pada setiap tahapan pelaksanaan program kartu tani. 2). Permasalahan implementasi program kartu tani dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang menjadikan kompleksitas dan kesinambungan dalam permasalahan. Saran yang dapat diberikan adalah mengoptimalkan dan membuat mekanisme yang lebih mudah dan secara aplikatif dapat dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran (Wahid, Gayatri, & Prayoga, 2021)

Penelitian ke lima, yang berjudul "Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah" mendeskripsikan penyebab utama permasalahan distribusi pupuk disebabkan oleh sistem yang diterapkan saat ini belum berjalan optimal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mencanangkan Program Kartu Tani. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan teknik stratified random

sampling sebanyak 100 sampel dari seluruh perwakilan di setiap kecamatan. Data penelitian dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan metode Partial Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kartu Tani masih rendah yaitu sebesar 23,5 persen. Penelitian juga menyatakan bahwa implementasi Kartu Tani berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi. Adapun faktor yang signifikan memengaruhi implementasi Kartu Tani adalah faktor pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, faktor sosial budaya dan faktor kondisi ekonomi petani (Chakim, Rifin, & Sanim, 2019).

Penelitian ke enam, dengan judul “Faktor yang Memengaruhi Keputusan Adopsi Petani terhadap Kartu Tani di Eks-Karesidenan Surakarta” mendeskripsikan program pemerintah terkait kartu tani bertujuan menyejahterakan petani, tetapi saat ini belum terealisasi secara luas. Penelitian dilaksanakan bulan Januari hingga Februari 2020 di Karesidenan Surakarta, khususnya Kabupaten Karanganyar dan Klaten. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil: variabel tingkat pendidikan, karakteristik inovasi, dan persepsi petani berpengaruh signifikan terhadap keputusan adopsi petani, sedangkan variabel usia, luas lahan, pengalaman bertani, dan peran penyuluh tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan adopsi petani. Variabel yang paling penting dalam menentukan adopsi petani terhadap kartu tani di Eks-Karesidenan Surakarta adalah variabel karakteristik inovasi (Yuliana & Nadapdap, 2020)

Penelitian ketujuh, dengan judul “Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo” mendeskripsikan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Tani terbanyak dan lahan sawah terluas adalah Durung Bedug. Fokus dari penelitian ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Penanggung Jawab Kartu Tani dari Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Koorluh Kecamatan Candi, PPL Desa. Durung Bedug. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Durung Bedug (Mufidah & Prabawati, 2018).

Penelitian ke delapan, dengan judul "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus Pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah)" mendeskripsikan tujuan dari penelitian untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani pada petani nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga, berlandaskan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 11/Kpts/SR. 310/30/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan perolehan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan serta telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Kartu Tani di Desa Siwarak sudah sesuai pada regulasi yaitu pengusulan, penerbitan dan penebusan, namun dalam penerapannya masih belum optimal. Faktor pendukung dari implementasi yaitu adanya sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai dan partisipasi masyarakat. Faktor penghambat dilihat dari adanya keterbatasan jarak dan biaya dalam mengakses pupuk subsidi, hambatan dalam penyusunan dan validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok serta lemahnya jaringan dalam mengakses Kartu Tani (Lestari & Wijayanto, 2022)

Penelitian kesembilan, dengan judul "Analisis Kebijakan Pemberlakuan Kartu Tani Di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang: Analisis Kebijakan Pemberlakuan Kartu Tani Di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang" mendeskripsikan ketersediaan pupuk dan sumber daya penyuluh

berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah yang akan digarap oleh petani. Nasional Pemberlakuan Kartu Tani khususnya di kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, suatu kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan kartu tani sudah dilakukan sosialisasi melalui UPTD Pertanian dan PPL kepada masyarakat. Tentunya proses ini dapat meningkatkan kinerja kebijakan sehingga masyarakat dapat menerima dengan jelas dan rinci atas kebijakan tersebut. Sosialisasi tersebut bisa dalam bentuk formal ataupun non formal. Dinas Pertanian Kabupaten Karawang melaksanakan intervensi spesifik kebijakan pusat, yaitu upaya mencegah agar petani tidak lagi kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi. Karawang sudah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Standar Operasional Prosedur yang terdapat di Dinas Pertanian Kabupaten Karawang berkaitan dengan SOP manajemen, SOP perencanaan dan SOP pelaksanaan kegiatan dan SOP pelaporan (Nurhasan, Suhaerudin, Santoso, & Bastaman, 2022).

Penelitian kesepuluh, dengan judul "Analisis Efektivitas Kartu Tani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani di Lingkungan Cilipung" mendeskripsikan sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor penting di Indonesia sebagai negara agraris. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Bank Mandiri, BRI, dan BNI merancang program kartu tani untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program kartu tani ini masih baru, tetapi sudah cukup efektif dalam membangun kesejahteraan petani di Lingkungan Cilipung RT 04 RW 15, Sumedang, Jawa Barat. Namun, masih ada petani yang belum terdaftar karena kurangnya sosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kartu tani tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Lingkungan Cilipung RT 04 RW 15 telah terdaftar dan kartu tani mereka diterbitkan oleh Bank Mandiri (Rosyid, et al., 2021).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, maka keterbaruan dalam penelitian (state of the art) ini adalah penelitian ini fokus pada Implementasi Kebijakan Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Subsidi di Kecamatan Tambun Utara

Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini berlandaskan penelitian terdahulu sebagai dasar atau pijakan dalam penelitian. Karena dengan adanya penelitian terdahulu atau yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka dari segi landasan teorinya semakin jelas, valid, serta dapat memiliki hipotesis penelitian yang membuat riset di dalam penelitian menjadi penting untuk dilakukan agar mencapai target yang diinginkan sebagai hasil akhir.

1.4.2 Signifikan Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi disamping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu SoSial Dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang Efektivitas Implentasi Kartu Tani dalam distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan suatu kebijakan dalam melayani publik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat lebih memperhatikan sejauh mana setiap daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di setiap daerah terutama di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan penelitian ini yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami secara keseluruhan isi dari penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan penelitian mengenai Efektivitas Implentasi Kartu Tani dalam distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. tersusun atas sistematika sebagai berikut;

- **BAB 1 Pendahuluan**

Dalam bab I ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan di teliti dalam bentuk uraian. Kemudian bab ini membahas perumusan masalah sebagai

fokus dari penelitian yang akan dilakukan demi mencapai hasil penelitian yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian di menungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Kegunaan penelitian yaitu menjelaskan manfaat teoritis dan praktis yang berguna bagi peneliti, pembaca, dan instansi terkait. Sistematika yang digunakan untuk mempermudah pembaca mengetahui isi dari penelitian ini secara keseluruhan. serta kerangka teoritis mengkaji berbagai teori yang relavan dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini.

- **BAB II Kerangka Teori**

Bab II ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab problematika dalam penelitian ini. Serta Kerangka pemikiran menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan teori yang relavan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat merumuskan asumsi penelitian sementara.

- **BAB III HASIL Metode Penelitian**

Bab III ini Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Implentasi kebijakan Kartu Tani dalam distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

- **Bab 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab IV ini Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Efektivitas Implentasi Kartu Tani dalam distribusi pupuk subsidi di Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

- **Bab V Penutup**

Bab V memuat penjelasan mengenai kesimpulan yang dibuat secara singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya peneliti memberikan saran yang memilki isi berupa tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis. Saran praktis biasanya lebih operasional sedangkan pada aspek teoritis lebih mengarah pada pengembangan atau teori.